

## **Dilema ASEAN Centrality dan Respon ASEAN Dalam Menghadapi Pembentukan Pakta Pertahanan Antara Australia – Inggris – AS (AUKUS)**

**Wirandita Gagat Widyatmoko<sup>1</sup>, Hikmat Zakky Almubaroq<sup>2</sup>, Herlina J.R. Saragih<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Indonesia  
gagatwirandita@gmail.com

### **ABSTRACT**

*The dynamics that occur in the Indo-Pacific region have developed into a major issue for the global community. A new phenomenon that occurred was Australia, Britain and the United States agreed to a defense pact called AUKUS. The defense alliance is implied as a form of cooperation to face China's increasingly strong dominance in the region. The presence of AUKUS affects the complexity of regional security conditions which in particular will have its own influence on regional stability. ASEAN's centrality and Indonesia's membership in ASEAN are being tested again. Therefore, this article aims to describe the attitude of Indonesia and ASEAN and Indonesia's leadership in ASEAN in facing the dynamics of the strategic environment. The research method used is qualitative through literature study. Sources of research data are articles obtained through various sources, including books, journals, and news on the internet. The results of this article show that Indonesia is consistent with the principle of a free-active foreign policy, while ASEAN Centrality is doubtful and Indonesia needs to show its important role in ASEAN.*

**Keywords:** AUKUS, ASEAN Centrality, Indonesia, Indo-Pacific, Regional Stability.

### **ABSTRAK**

Dinamika yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik telah berkembang menjadi isu utama masyarakat global. Fenomena baru yang terjadi adalah Australia, Inggris dan Amerika Serikat menyepakati pakta pertahanan yang bernama AUKUS. Aliansi pertahanan tersebut tersirat sebagai bentuk kerja sama menghadapi dominasi China yang semakin menguat di kawasan. Hadirnya AUKUS berpengaruh terhadap kompleksitas kondisi keamanan kawasan yang secara khusus akan memberikan pengaruh tersendiri bagi stabilitas kawasan. Sentralitas ASEAN dan keanggotaan Indonesia di ASEAN kembali di uji. Oleh Karena itu penulisan artikel ini bertujuan untuk menggambarkan sikap Indonesia dan ASEAN dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN menghadapi dinamika lingkungan strategis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui studi kepustakaan. Sumber data penelitian artikel didapatkan melalui sumber beragam, meliputi buku, jurnal, dan berita di internet. Hasil penelitian artikel ini menunjukkan bahwa Indonesia konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif, sedangkan ASEAN Centrality diragukan dan Indonesia perlu menunjukkan peran pentingnya di ASEAN.

**Kata kunci:** AUKUS, ASEAN Centrality, Indonesia, Indo-Pasifik, Stabilitas Kawasan.

### **PENDAHULUAN**

ASEAN sebagai salah satu organisasi regional kawasan merupakan organisasi yang memiliki stabilitas yang tinggi dan sifat yang dinamis pada lingkungan Dunia Ketiga (Wibowo, 2010). Hal tersebut didasari oleh walaupun terdapat heterogenitas yang tinggi diantara negara – negara yang ada didalamnya namun ASEAN tetap mampu bertahan

hingga saat ini. Semua itu tidak terlepas dari peran dan kepemimpinan Indonesia. Kepemimpinan ASEAN digilir setiap tahun sekali antara tiap negara anggota. Kepemimpinan ASEAN bergilir berdasarkan urutan abjad nama negara-negara dalam Bahasa Inggris (Aisyah, 2022). Sejak ASEAN berdiri tahun 1967, Indonesia tiga kali menjabat sebagai Ketua ASEAN yakni pada tahun 1976, 2003 dan 2011. Indonesia memiliki kepentingan yang tinggi untuk memastikan ASEAN menjadi organisasi yang kuat secara internal, dan dipertimbangkan secara serius oleh dunia internasional. Terdapat banyak sumbangsih Indonesia di ASEAN sehingga membuat Indonesia pada tahun 2023 akan kembali terpilih menjadi Ketua ASEAN (Nindya & Abiyya, 2022).

Pada lingkungan kawasan, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang terbesar serta sebagai pemimpin dari ASEAN yang telah banyak berkontribusi melahirkan gagasan yang kemudian menjadi rujukan dalam melakukan kerja sama di kawasan (Grehenson, 2021). Di bawah kepemimpinan Indonesia gagasan – gagasan besar tersebut lahir menjadi hal – hal yang vital di berbagai sektor kerja sama. Salah satu hal yang menjadi upaya Indonesia dalam mendorong kerja sama di kawasan ASEAN adalah Indonesia berupaya mendorong negara – negara ASEAN agar melakukan ratifikasi protokol kerja sama kawasan ASEAN bebas senjata nuklir melalui kerangka *South East Asia Weapon-Free Zone* (SEANWFZ). Melalui kerangka tersebut Indonesia memberikan opsi beberapa hal, meliputi (Arifan, 2018):

1. Proses penandatanganan sampai ratifikasi dapat dilakukan secara bertahap, diawali oleh negara yang tidak akan melakukan ratifikasi dan negara yang akan melakukan ratifikasi dan menjalankan kerangka kerja sama secara menyeluruh di negaranya.
2. Negara yang tidak melakukan ratifikasi perjanjian dapat langsung bernegosiasi dengan negara yang memiliki nuklir untuk menghadirkan solusi bersama.

Selain itu, Indonesia juga memberikan opsi langkah penyelesaian konflik sengketa yang terjadi di Laut China Selatan melalui opsi 3+1 sebagai bagian dari tujuan adanya *Code of Conduct* yakni (Delanova, 2021):

1. Meningkatkan rasa kepercayaan.
2. Mencegah terjadinya insiden.
3. Mengatasi insiden yang mungkin dapat terjadi.
4. Menciptakan suasana yang kondusif di kawasan guna penyelesaian CoC.

Selanjutnya Indonesia juga menjadi pelopor lahirnya lembaga *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation* (AIPR) yang berorientasi kepada penelitian untuk hadirnya kapabilitas untuk mendorong terjadinya perdamaian dan Rekonsiliasi konflik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Setelah terbentuk, AIPR sesuai dengan orientasinya memiliki peran vital dalam mengidentifikasi keberadaan konflik yang terjadi di kawasan kontribusi Indonesia dalam bidang keamanan lainnya juga terwujud dalam upaya penanggulangan radikalisme dan terjadinya kekerasan ekstrimisme. Kontribusi Indonesia tersebut ditunjukkan melalui kerangka *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT) 2007 dan berlaku pada tahun 2011 Selanjutnya didasari oleh terjadinya tindak kejahatan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUUF) Indonesia menginginkan adanya peraturan terkait tindak kejahatan IUUF tersebut maka pada tahun 2010 Indonesia juga mendorong untuk dibentuknya *ASEAN Maritime Forum* (AMF) (Gaol, 2017). Beberapa upaya Indonesia ini merupakan wujud dari keinginan

untuk memperkuat ASEAN di mata internasional sekaligus memenuhi tugasnya sebagai ketua sekaligus pemimpin ASEAN. Adapun tugas-tugas ketua ASEAN seperti memimpin KTT ASEAN, aktif memajukan dan meningkatkan kepentingan serta kesejahteraan ASEAN termasuk membangun komunitas ASEAN melalui inisiatif kebijakan, koordinasi dan kesepakatan, memastikan sentralitas ASEAN, memastikan respon yang efektif dan tepat waktu mengenai permasalahan atau situasi krisis yang berdampak terhadap ASEAN (Aisyah, 2022).

Saat ini ASEAN kembali dihadapkan oleh tantangan baru hasil dari kesepakatan kerjasama pertahanan oleh tiga negara besar yakni Australia, Inggris dan Amerika Serikat yang kemudian disebut sebagai AUKUS. AUKUS adalah kerjasama penting bagi Australia yang akan mempererat kerjasama tiga negara secara signifikan dalam berbagai kemampuan keamanan dan pertahanan selama beberapa dekade mendatang (Wintour, 2021). Aliansi AUKUS bertujuan untuk menjadi wadah berbagi informasi dan transfer teknologi serta sebagai inisiasi besar yang akan menyediakan armada kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia, bagi Australia kerjasama ini dapat menambah kekuatan guna menghadapi situasi kawasan yang dinamis dimana AUKUS sendiri di sepakati di tengah peningkatan ketegangan kawasan pada pertengahan September 2021, pakta ini disebut disepakati sebagai respon dalam meredam pengaruh China yang agresif di kawasan Indo-Pasifik (Nindya & Abiyya, 2022).

Kerjasama tersebut dinilai akan mengancam stabilitas di kawasan Asia Pasifik khususnya kepada negara – negara anggota ASEAN. Sampai saat ini organisasi yang beranggotakan negara – negara Asia Tenggara tersebut, masih belum mengeluarkan pernyataan resmi sebagai respon terhadap perjanjian tersebut yang memiliki dampak politik signifikan di kawasan. Sikap ASEAN yang cenderung diam dalam merespon dinamika lingkungan kawasan bukan menjadi hal yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, ASEAN sering tidak memberikan tanggapannya kepada isu-isu sensitif didasari oleh adanya kebijakan non-intervensi yang telah disepakati. Di sisi lain, keheningan yang terjadi dipicu oleh adanya perpecahan di antara negara-negara anggota ASEAN yang memiliki pandangan yang berbeda (Delanova, 2021). Sekali lagi peran Indonesia di ASEAN diuji melalui isu AUKUS ini, Indonesia perlu memainkan peran dan pengaruhnya untuk dapat merangkul negara – negara di kawasan untuk bersatu dan mempertegas sentralitas ASEAN masih dan akan terus. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat bagaimana dilemma prinsip *ASEAN Centrality* serta respon Indonesia dan ASEAN dalam menghadapi pembentukan Pakta Pertahanan antara Australia, Inggris dan AS.

## TINJAUAN PUSTAKA

Kajian akademik yang telah dilakukan mengenai peran Indonesia di ASEAN sebelumnya telah banyak dibahas melalui kajian – kajian yang dilakukan. Menurut Suwanti Sari dalam tulisannya yang berjudul “Peran Indonesia Dalam Implementasi *ASEAN Political Security Community*”, Indonesia telah melakukan banyak kerja sama yang dijelaskan secara spesifik dalam bidang politik, keamanan dan hukum yang mencakup berbagai permasalahan keamanan. Terealisasinya pilar ASEAN juga tidak terlepas dari peran penting yang dilakukan oleh Indonesia.

Indonesia sebagai negara berkembang sekaligus negara besar di ASEAN terlibat dalam kepentingan persepsi tentang keamanan yang berkembang di Asia Tenggara dan telah mendapatkan amanat untuk mewujudkan APSC sebagai pilar ASEAN (Sari, 2019).

Indonesia menyadari perannya yang lebih signifikan dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya, dan telah memimpin wacana pembentukan Politik-Keamanan ASEAN Komunitas, dan juga di bidang HAM melalui *ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights* (Pisanò, 2014). Pembentukan kerangka tersebut merupakan bentuk nyata dari kepemimpinan Indonesia dalam menciptakan norma dan lembaga baru untuk ASEAN yang berfokus kepada HAM yang merupakan isu sensitif bagi beberapa negara anggota ASEAN. Berbagai sumber ini menunjukkan dinamika posisi pentingnya Indonesia di ASEAN dalam menyikapi berbagai isu yang ada.

Tulisan selanjutnya ditulis oleh Annisa Putri Nindya dan Rifqy Alief Abiyya dengan judul “Pengaruh AUKUS Terhadap Stabilitas Indo-Pasifik dan Sikap Indonesia”. Tulisan ini menjelaskan bagaimana terbentuknya AUKUS sebagai respon melawan dominasi Tiongkok di Indo-Pasifik justru menimbulkan situasi perlombaan senjata dan menjadi latar belakang dari reaksi beragam negara-negara dalam kawasan salah satunya adalah Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang menyatakan kekhawatirannya terhadap perlombaan senjata yang mungkin tidak dapat dihindarkan. Setelah elaborasi lebih lanjut, dapat diketahui bahwa dinamika geopolitik Indo-Pasifik memang terus-menerus menciptakan tensi akibat persaingan pihak-pihak eksternal. Indonesia sebagai negara non-blok dan penganut politik bebas aktif diharapkan mampu memaknai kembali prinsipnya dan tegas dalam memelopori keamanan kolektif dengan sikap tegas satu suara bersama negara ASEAN lainnya.

Adapun respon Indonesia terhadap fenomena tersebut yakni Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang memberikan pernyataan resmi dalam sebuah pertemuan dengan Asia Society melalui Menteri Retno Marsudi, bahwasanya terdapat kekhawatiran mengenai aliansi ini akan meningkatkan kemungkinan terjadinya perlombaan senjata dan power projection, dimana kemudian dampaknya adalah guncangan pada stabilitas perdamaian kawasan. Indonesia dihadapkan dilema akibat politik luar negeri bebas aktif yang memposisikan Indonesia berada di tengah dua kubu. Dengan statusnya sebagai amity bagi semua kubu khususnya dengan Australia sebagai negara satu kawasan yang terlibat dalam aliansi tersebut, Indonesia dihadapkan dilema untuk mempertahankan militernya dari konflik dengan Australia sendiri (Nindya & Abiyya, 2022).

Tulisan ini akan berupaya untuk mengangkat bagaimana peran Indonesia secara jelas dalam menghimpun satu suara dengan negara – negara ASEAN untuk mengedepankan sentralitas sebagai *core value* organisasi regional tersebut dalam menghadapi ancaman – ancaman eksternal yang menjadi bagian dinamika lingkungan strategis yang terjadi termasuk AUKUS. Melalui kerangka – kerangka kerja sama yang sudah ada di antara negara ASEAN sudah sepatutnya dalam menghadapi ancaman eksternal dari luar seluruh negara anggota komunitas dapat secara konsisten memiliki kesamaan pandangan dan menjadi sebuah bekal untuk komunitas dalam menghadapi dinamika yang terjadi.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan analisis terkait dampak AUKUS bagi Kawasan, penulis menggunakan pendekatan kualitatif berbasis dokumen atau *desk research* (Travis, 2016). *Desk research* adalah nama lain untuk penelitian sekunder. Peran penulis sebagai peneliti yang melakukan *desk research* adalah untuk meninjau temuan penelitian sebelumnya untuk mendapatkan pemahaman yang luas tentang bidang

tersebut. Dalam analisis dokumennya, penelitian ini menggunakan data sekunder (kajian literature) yang didapat dari Jurnal, *Press Release* Kementerian Luar Negeri dan negara lain, serta berita internasional. Menurut Sugiyono data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan melalui proses membaca, mempelajari dan memahami melalui media yang bersumber pada literatur, buku-buku, serta dokumen (Febriansyah & Herviani, 2016).

## KERANGKA PEMIKIRAN

Teori Kompleksitas Keamanan Regional atau *Regional Security Complex Theory* (RSCT) menurut Buzan dan Waver yaitu penekanan terhadap unsur regional atau kawasan ketika memahami sebuah dinamika keamanan dan perkembangan negara yang berada di kawasan tersebut. Negara-negara yang memang berada dalam satu kawasan bukan berarti memiliki keharmonisan yang terus-menerus atau bagaikan tidak ada ketegangan satu sama lain walaupun antar negara memiliki ketergantungan satu sama lain. Permasalahan keamanan di kawasan pun dapat memengaruhi keamanan nasional negara. Dalam suatu kawasan bahkan dipenuhi oleh beberapa hal seperti aliansi negara lain hingga muncul external power, lalu perimbangan kekuatan antar negara (Grabowski, 2020).

Terdapat empat tingkatan dalam menganalisis keamanan kawasan. Pertama, bersumber pada keamanan domestik satu negara. Keamanan domestik suatu negara dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap negara lain karena bisa jadi akan merembet yang disebabkan ketidakstabilan dari keamanan domestik tersebut. Kedua, terbentuk karena adanya hubungan antar negara di kawasan tersebut. Hubungan atau adanya interaksi antar negara dalam kawasan inilah yang bisa memengaruhi tindakan dan kondisi keamanan tersebut. Ketiga, adanya interaksi satu kawasan dengan kawasan lain yang dimana interaksi ini dapat meningkatkan keamanan atau justru meningkatkan kondisi yang lebih tegang dalam kawasan tersebut. Lalu keempat yang terakhir adanya kekuatan global yang dirinya merasa memiliki peran di kawasan tersebut, dalam artian aktor-aktor dari luar kawasan ikut campur karena negara atau aktor tersebut memiliki kekuatan atau power (Nindya & Abiyya, 2022).

Kompleksitas keamanan ASEAN dan berbagai respon Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya dalam menyikapi persaingan Tiongkok dengan AS bisa dilihat dari kacamata teori *Regional Security Complex Theory*. Permasalah Laut Tiongkok Selatan yang menjadi isu panas hingga saat ini antara beberapa negara ASEAN dengan Tiongkok menyebabkan rumitnya dinamika keamanan wilayah. Belum lagi seperti terancamnya klaim Laut Tiongkok Selatan oleh Tiongkok yang membuat beberapa negara ASEAN geram dan protes. Lalu adanya kekuatan global seperti dari Amerika Serikat yang mencoba memperluas pengaruhnya di ASEAN atau Indo-Pasifik secara umum. Adanya AUKUS bisa dikatakan menjadi salah satu cara menyebarkan pengaruh Amerika. Mereka tidak secara langsung terjun, akan tetapi ada wadah dan berakhir kepada perjanjian yang menjadi batu loncatan Amerika Serikat. Walaupun tidak langsung, efek dari AUKUS inilah yang membuat stabilitas keamanan Indo-Pasifik semakin kompleks.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Terbentuknya pakta kerjasama pertahanan antara Australia, Inggris dan Amerika Serikat yang disebut AUKUS menimbulkan kecaman dari berbagai pihak. Respon keras datang dari Prancis yang menarik duta besarnya dari Australia dan Amerika Serikat sehari setelah pakta tersebut diumumkan kepada publik sebagai bentuk protes. Menlu Prancis bahkan menuding AUKUS merupakan sebuah pengkhianatan oleh Australia dan Amerika, kekecewaan Prancis merupakan implikasi batalnya kesepakatan pengadaan kapal selam bertenaga diesel antara Prancis dan Australia yang bernilai \$40 miliar (senilai Rp569 triliun) yang telah disepakati pada tahun 2016 sebagai implikasi pembatalan kerja sama oleh Australia. Macron menambahkan pakta AUKUS adalah sinyal bahwa Eropa perlu mengembangkan strategi pertahanan dan keamanan globalnya sendiri, termasuk di Indo-Pasifik, dan mengurangi ketergantungan pada AS (Nindya & Abiyya, 2022).

China sebagai motivasi pakta ini dibentuk menanggapi pengumuman AUKUS dengan meminta Amerika Serikat meninggalkan kebiasaan lama yang masih menggunakan mentalitas perang dingin yang sudah usang dan menyatakan Amerika Serikat bertanggung jawab atas resiko yang akan timbul akibat pakta ini. Respon seperti ini sudah sering timbul dari Beijing tiap kali ketegangan kawasan meningkat bahwa pihak Amerika Serikat perlu bertanggung jawab atas memburuknya hubungan kedua negara maupun kawasan. China memandang bahwa perjanjian yang disepakati oleh tiga negara barat tersebut akan membawa instabilitas di kawasan. AUKUS sendiri akan membuat China semakin memperkuat kehadiran militernya di Indo-Pasifik dan mungkin membuat China akan melakukan pendekatan – pendekatan dengan negara di kawasan dengan memperluas hubungan ekonomi dan perdagangannya untuk menjalin aliansi (Delanova, 2021).

Beberapa pihak berpendapat bahwa AUKUS dapat melanggar Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Dalam Perjanjian tersebut termuat bahwa yang dapat melakukan upaya pengayaan uranium untuk kebutuhan nuklir hanyalah Negara yang memiliki senjata nuklir. Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan kesepakatan internasional, hanya negara anggota tetap Dewan Keamanan saja yang dapat memiliki senjata nuklir, yaitu AS, Rusia, China, Inggris, dan Prancis. Namun, di sisi lain ada pihak lain yang berpendapat bahwa AUKUS sama sekali tak melanggar perjanjian NPT karena berdasarkan kesepakatan yang dicapai, AS – lah yang akan menjadi pemasok uranium yang sebelumnya sudah dilakukan proses pengayaan (Novita, 2022).

Respon beragam datang dari negara – negara Anggota ASEAN, sebagai kawasan yang terdampak langsung akibat kerjasama pertahanan ini mereka terpecah menentukan sikap ada yang mendukung kerjasama pertahanan tersebut ada juga yang mengkhawatirkan kerjasama ini akan menimbulkan instabilitas di kawasan.

### RESPON NEGARA – NEGARA ASEAN TERHADAP AUKUS

Keberadaan AUKUS sebagai *counter* atas dominasi Tiongkok di Indo-Pasifik menyebabkan beragam respon dari negara-negara anggota ASEAN yang wilayahnya menjadi pertarungan dominasi kepentingan geo-politik diantara negara-negara besar. Melihat ASEAN yang tidak kompak dalam merespon AUKUS dan mengingat bahwa ASEAN adalah kawasan multilateralisme dengan orientasi kepentingan yang berbeda-

beda, tentunya mengindikasikan kesulitan dalam menyikapi tensi antara AUKUS dan Tiongkok secara kolektif. Dalam hal ini, melihat ASEAN yang tidak kompak dalam merespon keberadaan AUKUS dan Tiongkok mengindikasikan minimnya upaya menjunjung prinsip ASEAN berupa *ASEAN Centrality* (negara anggota perlu untuk memiliki kesamaan persepsi dengan menjaga norma – norma yang berlaku di ASEAN dengan wujud menjaga netralitas yang tidak memihak salah satu kekuatan). Hal ini penting untuk menjadi penekanan, karena netralitas yang hilang akan memberikan dampak perpecahan diantara negara anggota sesuai dengan asas netralitas.

### **Indonesia**

Dalam sebuah pernyataan pada 17 September 2021, melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan dengan hati-hati dan menekankan bahwa Jakarta sangat prihatin atas perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan di kawasan". Indonesia meminta Australia agar melanjutkan memenuhi kewajiban non-proliferasi nuklirnya, dan meminta Canberra untuk mempertahankan komitmen terhadap perdamaian dan keamanan regional sesuai dengan Perjanjian dan Kerjasama di Asia Tenggara (TAC) (Kemlu RI, 2021). Kekhawatiran Indonesia tentang perlombaan senjata yang berkelanjutan dan proyeksi kekuatan mengacu tidak hanya pada tiga mitra AUKUS, tetapi semua negara-negara regional, termasuk Cina.

Menurut Abdul Kadir Jailani diplomat senior Indonesia, dia mempertegas pandangan pemerintah Indonesia. Dia menambahkan bahwa komunikasi yang lebih intens mengenai AUKUS akan membantu dalam upaya membangun rasa saling percaya (Kemlu RI, 2021). Kekhawatiran tentang perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan perlu diatur dalam perspektif yang tepat. Selain itu, untuk menyatakan bahwa AUKUS akan memicu perlombaan senjata adalah kebalikan dari logika sebab-akibat. Jelas bahwa AUKUS merupakan respon dari adanya tindakan yang semakin provokatif (Edel, 2021).

Setiap negara di dunia memiliki *national interest* yang perlu diwujudkan oleh masing – masing. Dalam konteks wilayah kepentingan nasional yang perlu di capai dapat berupa kepentingan di dalam maupun di luar. Sebagai bentuk upaya mencapai kepentingan nasional yang berada di luar batas wilayah negara, maka negara memiliki instrumen yang dapat digunakan berupa Politik Luar Negeri (Windiani, 2013). Merujuk kepada Indonesia, Prinsip yang digunakan dalam mewujudkan kepentingan nasional politik luar negeri yakni dengan mengedepankan prinsip Politik yang bersifat bebas-aktif.

Prinsip politik luar negeri bebas-aktif merupakan doktrin dasar yang digunakan oleh Indonesia dalam melakukan aktivitas hubungan internasionalnya dan telah digunakan sejak setelah Indonesia meraih kemerdekaan. Gagasan prinsip politik luar negeri bebas aktif sendiri pertama kali di sampaikan oleh Mohammad Hatta di Komite Nasional Indonesia Pusat melalui pidato "Mendayung Antara Dua Karang" pada 2 September 1948. Prinsip politik luar negeri Indonesia yang menganut bebas aktif dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan aktivitas politik luar negerinya Indonesia berupaya untuk menjalin hubungan dengan negara manapun dan juga menentukan sikap dan keputusan terhadap isu yang berkembang dalam dinamika yang terjadi dalam aktivitas hubungan internasional didasarkan kepada kepentingan

nasionalnya sendiri tanpa melibatkan diri dalam pengaruh blok – blok kekuatan yang ada (Rosyidin, 2021). Prinsip politik luar negeri yang bersifat bebas dan aktif dipilih guna menolak pengaruh dari adanya blok – blok kekuatan yang ada pada saat itu yakni kekuatan kiri yang dipimpin Uni Soviet dan kanan yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS). Prinsip bebas dan aktif yang dimiliki Indonesia menempatkan dirinya berada di tengah – tengah dua kekuatan dunia, yang membuat negara dalam melakukan aktivitasnya didasarkan kepada kepentingan nasionalnya sendiri tanpa terpengaruh blok kekuatan yang ada (Welianto, 2020).

Sedangkan prinsip aktif yang dimiliki diartikan harus senantiasa aktif berpartisipasi dalam aktivitas internasional dengan semangat mewujudkan ketertiban dunia serta mampu menjadi subyek yang dapat menentukan kebijakannya sendiri. Dalam semangat mewujudkan ketertiban dunia Indonesia berupaya untuk mengedepankan tiga prinsip dasar yakni kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Welianto, 2020).

Prinsip bebas-aktif yang diterapkan oleh Indonesia dalam melakukan aktivitas politik luar negerinya hingga saat ini dapat menjadi gambaran perspektif Indonesia dalam menerapkan strateginya dalam konstelasi Indo-Pasifik, dalam konteks tersebut Indonesia berupaya untuk menempatkan diri secara seimbang dengan mendorong semangat ketertiban dunia diantara semangat persaingan yang ada dengan turut mempertimbangkan kepentingan nasional Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan konsep Indo-Pasifik yang bernuansa persaingan kepentingan diantara negara-negara yang berasal dari dua blok kekuatan yang saat ini ditunjukkan dengan adanya rivalitas antara AS dan China yang hadir sebagai *emerging powers*. Dengan berpedoman pada prinsip bebas-aktif, Indonesia tidak akan memihak pusaran nuansa persaingan yang terjadi antara *great powers*, yang meliputi QUAD, AUKUS dan China di Indo-Pasifik.

Sebagian besar alasan mengapa proyeksi pengaruh AUKUS terhadap regional Indo-Pasifik cukup menakutkan adalah karena terpecahnya reaksi dimulai dari keberatan, dukungan hingga netral yang menyasar pada dilema beberapa negara berpengaruh dalam kawasan, sehingga akan sulit mencapai konsesus yang jelas dalam menyikapi kemungkinan dampak AUKUS. Salah satu negara berpengaruh tersebut adalah Indonesia, setelah menyatakan kekhawatirannya, Indonesia dihadapkan dilema akibat politik luar negeri bebas aktif yang memposisikan Indonesia berada di tengah dua kubu. Dengan statusnya sebagai amity bagi semua kubu khususnya dengan Australia sebagai negara satu kawasan yang terlibat dalam aliansi tersebut, Indonesia dihadapkan dilema untuk mempertahankan militernya dari konflik dengan Australia sendiri.

Indonesia dapat meninjau ulang makna dari politik luar negeri bebas aktif dan menemukan titik penting yang dapat menjadikannya relevan dengan situasi konflik di Indo-Pasifik. Indonesia harus tegas dan bukan netral tanpa sikap yang salah satunya adalah dengan condong pada misi AUKUS dalam mengurangi dominasi Tiongkok tanpa mengorbankan hubungan dengan Tiongkok dengan penguatan hubungan ekonomi. Dengan kata lain, AUKUS tidak bisa serta merta ditolak tetapi diberikan batasan-batasan yang jelas. Sehingga stabilitas keamanan dapat terjaga dengan respon kolektif yang logis dalam menanggapi isu antara kedua kubu tersebut (Nindya & Abiyya, 2022).

Dengan melihat hal tersebut, pemerintah Indonesia menyampaikan sikap lewat Kementerian Luar Negeri, Kemlu menyatakan prihatin dengan pengadaan kapal selam bertenaga nuklir bagi Australia. Indonesia mengingatkan kembali komitmen Australia terhadap non-proliferasi nuklir dan juga keamanan serta stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Indonesia dalam konteks pengadaan kapal selam tersebut berupaya untuk mengambil langkah cermat dengan penuh hati-hati dalam bersikap (Kemlu RI, 2021). Selain itu, Indonesia meminta Australia untuk melakukan komitmennya dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan merujuk kepada *Treaty of Amity and Cooperation*. Kemudian Indonesia meminta Australia dan mitra lainnya untuk mengutamakan dialog dalam upaya menyelesaikan perbedaan yang ada. Berkaitan dengan implikasi laut, Indonesia memberikan penekanan bahwa hukum internasional yang ada termasuk hukum UNCLOS 1982 harus terus dijunjung tinggi sebagai upaya mewujudkan perdamaian dan keamanan di kawasan.

Saat ini sikap politik luar negeri bebas-aktif sedang teruji relevansinya. Beberapa peristiwa terdapat yang mengindikasikan bahwa Indonesia ada kedekatan kepada salah satu kekuatan. Oleh karenanya pelaku penentu kebijakan seyogyanya lebih bijak kembali dalam membuat keputusan. Jangan sampai sikap bebas-aktif Indonesia harus tercoreng dan menjadi senjata makan tuan bagi Indonesia tanpa mendapatkan kepentingan nasional. Indonesia tak boleh hanya menunggu manuver dari setiap pihak. Indonesia harus segera mengaktifkan peran intelijen. Membuka mata dan telinga, untuk memahami peta dan arah kekuatan di kawasan. Kemudian meningkatkan kemampuan alustsista dan sumber daya nasional untuk menghadapi ancaman yang siap datang kapan saja. Konsentrasi pada masalah domestik dan terorisme sangat baik namun tidak boleh mengesampingkan persoalan strategis di lingkungan khususnya kawasan Indo-Pasifik.

### **Malaysia**

Perdana Menteri Malaysia Menteri Ismail Sabri Yaakob menyatakan keprihatinannya bahwa kerja sama pertahanan AUKUS dapat menjadi katalis untuk perlombaan senjata nuklir di kawasan dan mungkin memprovokasi beberapa negara untuk bertindak agresif, terutama di Laut Cina Selatan. Dalam mengangkat kekhawatiran ini, dia menekankan Komitmen Malaysia untuk Asia Tenggara sebagai Zona Damai, Kebebasan, dan Netralitas (ZOPFAN) dan Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANFWZ), serta Sikap Malaysia untuk tidak mengizinkan kapal bertenaga nuklir memasuki perairan teritorialnya (Shirodkar, 2021).

Selanjutnya, Menteri Pertahanan Hishammuddin Hussein dan Menteri Luar Negeri Saifuddin Abdullah mengeluarkan pernyataan mereka sendiri, mengulangi keresahan Perdana Menteri. Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad juga memperingatkan bahwa AUKUS meningkatkan risiko konflik Kekuatan Besar di Asia Tenggara. Kekhawatiran Malaysia bukan tanpa alasan namun terlalu berlebihan. Perlu dipahami bahwa AUKUS dirancang untuk memberi Australia kapal selam yang memiliki sumber tenaga nuklir dan bukan kapal selam yang memiliki kemampuan senjata nuklir.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Malaysia berturut-turut telah memperingatkan bahwa peningkatan intensitas kehadiran kapal perang negara asing di Laut Cina Selatan dapat menghadirkan instabilitas dan berisiko memicu

konfrontasi militer (Razak, 2019). Malaysia tetap teguh pada klaim teritorial dan hak ZEE-nya, menolak klaim sepihak sembilan garis putus-putus China dan mempertahankan hubungan pertahanan yang erat dengan AS, Australia dan, melalui *Five Powers Defense Arrangements* (FPDA), Inggris.

### **Filipina**

Respon dari Filipina menimbulkan perpecahan yang tajam di dalam pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte atas masalah keamanan nasional. Sejak Duterte menjabat pada tahun 2016, hubungan Amerika Serikat (AS) - Filipina berada di bawah tekanan karena janji kampanye Rodrigo Duterte untuk memutus kerja sama dengan Amerika dan ingin menjalin hubungan yang lebih dekat dengan China dan Rusia. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa setelah pengumuman AUKUS, Juru bicara kepresidenan Harry Roque mengatakan bahwa Duterte khawatir pakta itu dapat memicu perlombaan senjata nuklir. Namun, sebelum pernyataan Roque, dua anggota kunci kabinet Duterte telah menyatakan mendukung penuh AUKUS. Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana menyatakan itu Hak Australia untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya seperti yang juga dilakukan Filipina melindungi wilayahnya (Nepomuceno, 2021).

Menteri Luar Negeri Teddy Locsin mengeluarkan pernyataan resmi yang menyambut baik berdirinya AUKUS dan menyampaikan tiga poin penting. Pertama, anggota ASEAN, secara individu maupun kolektif, tidak memiliki kemampuan militer untuk menjamin perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara. Kedua, AS sebagai kekuatan penyeimbang kawasan namun secara geografis jauh dari kawasan, melalui penguatan kemampuan proyeksi kekuatan dengan Australia akan membantu mempertahankan keseimbangan kekuatan regional dan memungkinkan Canberra untuk merespons ancaman yang dihadapi kawasan dengan lebih baik. Ketiga, karena Australia tidak berusaha untuk memperoleh senjata nuklir, AUKUS tidak melanggar SEANFWZ atau komitmen Canberra terhadap Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir Senjata (NPT) atau sentralitas ASEAN. Dukungan Lorenzana dan Locsin untuk AUKUS mencerminkan dukungan Filipina untuk kerja sama AUKUS dalam menghadapi tindakan agresif China di Laut China Selatan.

Respon Filipina tentunya bukan hal yang mengejutkan mengingat negara tersebut adalah sekutu Amerika Serikat sejak lama. Dukungan secara implisit juga datang dari Singapura dan Vietnam yang tidak “terlalu cemas” dan secara tidak langsung mengatakan bahwa AUKUS adalah bagian dari penataan kembali geostrategis kawasan ke level yang lebih tinggi. Filipina beranggapan bahwa ASEAN tidak memiliki kekuatan militer yang mumpuni untuk menjaga perdamaian kawasan, sehingga kapal selam tenaga nuklir dianggap sebagai manuver peningkatan kekuatan yang dapat memproyeksikan kekuatan serta keseimbangan.

### **Thailand**

Sebagai sekutu perjanjian AS, tetapi juga mitra dekat China, Thailand menanggapi AUKUS dengan kehati-hatian. Thailand ingin menjaga hubungan baik dengan kedua belah pihak dan tidak ingin mengambil posisi dalam kerjasama trilateral tersebut yang dapat berisiko menyinggung Washington atau Beijing.

Bagaimanapun, pemerintah Thailand disibukkan dengan domestik masalah politik dan memiliki sedikit atensi untuk masalah keamanan regional.

Dengan demikian, belum ada tanggapan resmi dari kantor perdana menteri atau kementerian luar negeri atau pertahanan. Sepuluh hari setelah AUKUS diumumkan, Prime Menteri Prayut Chan-o-Cha menyampaikan pidato pra-rekaman di PBB di mana dia menjanjikan dukungan Thailand untuk Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir yang tidak ditandatangani oleh Australia dan NPT (Ministry of Foreign Affairs of Kingdom of Thailand, 2021).

### **Singapura**

Reaksi Singapura terhadap AUKUS mencerminkan dukungan untuk penempatan pasukan militer AS di wilayah tersebut. Setelah komunikasi tentang AUKUS dengan Scott Morrison, Perdana Menteri Lee Hsien Loong menyatakan dukungannya untuk hubungan panjang yang terjalin antara Singapura dan Australia. Dia mengungkapkan harapan bahwa AUKUS akan memberikan dampak yang konstruktif untuk perdamaian dan stabilitas kawasan serta menjadi pelengkap arsitektur regional (Ministry of Foreign Affairs of Singapore, 2021).

Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan mengungkapkan tanggapan yang sama. Dia menyatakan bahwa Singapura memiliki hubungan panjang dengan ketiga negara AUKUS dan menggambarkan kerja sama yang terjalin sebagai sarana yang menjadi bentuk saling kepercayaan dan keselarasan dan sangat bermanfaat. Ini menandakan bahwa Singapura tidak terlalu cemas pada kerja sama yang terjalin. Posisi Singapura sendiri tidak menggambarkan kebijakannya selama ini. Selama ini Singapura selalu berusaha untuk mendukung keseimbangan kekuatan di mana tidak ada kekuatan besar yang mendominasi di kawasan; juga berusaha untuk melibatkan kekuatan-kekuatan besar, khususnya AS, dalam keamanannya (Choong, 2020). Dalam konteks ini AUKUS di pandang sebagai upaya untuk keseimbangan kekuatan dari pertumbuhan kekuatan China di kawasan.

### **Vietnam**

Pendekatan Vietnam terhadap AUKUS relatif sama terhadap pendekatan yang dilakukan oleh Singapura. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam menyatakan bahwa semua negara harus bekerja menuju tujuan perdamaian yang sama, stabilitas, kerjasama dan pembangunan di kawasan. Dalam pernyataan tersebut juga menekankan bahwa energi nuklir yang digunakan untuk armada kapal selam baru Australia harus digunakan untuk tujuan damai, melayani pembangunan sosial-ekonomi, dan memastikan keamanan bagi manusia dan lingkungan (Anh, 2021).

Perselisihan Hanoi dengan China di Laut China Selatan telah membawa Vietnam untuk menjalin hubungan yang lebih kuat dengan AS, serta negara-negara Quad lainnya. Sementara Hanoi belum menyatakan dukungan terbuka untuk strategi FOIP yang dikembangkan oleh negara-negara Quad, namun telah menyatakan dukungan untuk prinsip-prinsip FOIP, seperti pentingnya menjaga kebebasan navigasi dan menyelesaikan sengketa secara damai dan sesuai dengan hukum internasional (Chatys, 2021).

## IMPLIKASI TERBENTUKNYA AUKUS BAGI KAWASAN

Meningkatnya eskalasi konflik di kawasan telah mengundang perhatian dan kekhawatiran bukan saja bagi negara-negara di kawasan, namun juga bagi komunitas global. Munculnya AUKUS tentunya menarik perhatian dari negara-negara di kawasan IndoPasifik khususnya Tiongkok yang menjadi oposisi dari Amerika Serikat. Khususnya di kawasan Indo-Pasifik mulai dari militer hingga ekonomi memang didominasi oleh Tiongkok dan ketika negara menentang Tiongkok dapat berpengaruh kepada ekonomi dan keamanan kawasan. Dominasi kekuatan Tiongkok dalam berbagai aspek baik militer ataupun ekonomi di kawasan Indo-Pasifik inilah yang menjadikan AUKUS sebagai jalan untuk distribusi kekuatan di kawasan tersebut, bukan sekadar dominasi kekuasaan Tiongkok dalam kawasan (Nindya & Abiyya, 2022).

Hal ini memang disoroti oleh Tiongkok bahwa perjanjian AUKUS merupakan sinyal dari Washington sebagai peringatan untuk menangkis bahkan melawan bagaimana perkembangan kekuatan militer dari Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Perlu kita ketahui juga bahwa saat ini kawasan regional Indo-Pasifik menjadi tempat atau ladang dari ekonomi dan geopolitik global. Inilah yang menjadi sorotan negara-negara sehingga hasrat dari negara-negara super power yang memang memiliki kekuatan dan pengaruh ingin dimana pengaruh dari negaranya dominan di kawasan tersebut. Kawasan ini tidak lepas dari persaingan dua negara adidaya yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok yang pastinya dapat memengaruhi kondisi stabilitas keamanan kawasan. Beberapa implikasi serius bagi komunitas regional, khususnya negara Asia Tenggara sebagai akibat dari persaingan Tiongkok dengan AUKUS, antara lain:

### a. Integritas ASEAN

ASEAN ada di tengah dua kekuatan besar yang sedang menunjukkan kekuatan pengaruhnya di kawasan, ASEAN dalam hal ini sebagai organisasi sentral diharapkan mampu memberikan opsi solusi di kawasan. Untuk dapat berperan maksimal, soliditas ASEAN sangat diperlukan. Ada kekhawatiran bahwa kegagalan ASEAN dalam mengambil sikap bersama akan membuat negara ASEAN memutuskan untuk memihak salah satu kekuatan dan terbukti dalam menyikapi AUKUS Filipina sudah menyatakan mendukung blok pertahanan itu. Kegagalan ASEAN juga akan berimplikasi pada sentralitas, persatuan, dan melanggar prinsip penyelesaian damai seperti yang tertuang dalam piagam ASEAN.

### b. Perlombaan Senjata (*Arms Race*)

Keberadaan AUKUS dalam kawasan Indo-Pasifik diinterpretasikan banyak akademisi untuk melakukan *balance of power* keberadaan China yang semakin terlihat menguasai kawasan dengan BRI. Menurut Schmidt *balance of power* sendiri merupakan kondisi dimana terjadi upaya penyeimbangan kekuatan yang dimiliki terhadap kemampuan Negara lain sebagai bentuk upaya mencegah adanya dominasi dari sebuah negara (Afrimadona & Komeini, 2013). Dengan adanya hal tersebut maka antar Negara kawasan berusaha untuk meningkatkan kapasitas pertahanannya, sehingga muncul lah *Arms Race* atau perlombaan senjata.

Menurut Buzan dan Herrings, *arms race* merupakan sebuah kondisi akibat setiap Negara menginginkan keamanan nasional sebagai tujuannya dan juga

dipengaruhi oleh perkembangan teknologi persenjataan yang semakin pesat (Prasojo, 2013). Melindungi kepentingan nasional secara militer dapat diartikan dengan menghadirkan kekuatan angkatan bersenjata di wilayah yang menjadi objek kepentingan nasional. Upaya negara – negara di kawasan dalam melindungi kepentingan nasional di kawasan menimbulkan meningkatnya jumlah anggaran pertahanan. Hal ini berimplikasi bahwa mau tak mau membuat negara-negara di kawasan terus memperbarui kekuatan militer negaranya untuk mengantisipasi ancaman di kawasan yang begitu dinamis.

#### ASEAN CENTRALITY DAN ASEAN OUTLOOK ON INDO-PACIFIC

Kehadiran kerja sama pertahanan *Quadlital* dan China di dalam kawasan telah memberikan pengaruh kepada stabilitas ASEAN. Pengaruh tersebut saat ini bertambah semakin kompleks dengan adanya Pakta pertahanan AUKUS. Hal ini memberikan perpecahan diantara negara – negara ASEAN dalam menyikapi isu yang berkembang. Negara ASEAN terbagi ke dalam dua sikap yang berbeda meliputi persetujuan dan dukungan terhadap adanya AUKUS yang membuat lebih dekat dengan Amerika Serikat dan sekutu, sedangkan ada yang memilih untuk tetap netral dalam mengambil sikap. Dalam konteks ASEAN *centrality* negara – negara anggota perlu untuk memiliki kesamaan persepsi dengan menjaga norma – norma yang berlaku di ASEAN dengan wujud menjaga netralitas yang tidak memihak salah satu kekuatan. Hal ini penting untuk menjadi penekanan, karna netralitas yang hilang akan memberikan dampak perpecahan diantara negara anggota sesuai dengan asas sentralitas (Delanova, 2021).

Pada pelaksanaan KTT ASEAN yang ke-9 di Nusa Dua, Bali, pada 7-8 Oktober 2003 salah satu program yang terbentuk yakni Komunitas Keamanan ASEAN (*ASC-ASEAN Security Community*). Perumusan Bali Concord II pada KTT ke-9 memuat adanya tiga pilar konsep komunitas ASEAN meliputi Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC), Komunitas Keamanan ASEAN (ASC), serta Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASSC). Selain itu ASEAN juga memiliki prinsip *ASEAN Centrality* yang harus dipatuhi. Sentralitas ASEAN tersebut berlaku dalam hubungan politik, ekonomi, sosial dan budaya sembari tetap aktif terlibat dengan wawasan luar regional, inklusif dan non-diskriminatif (Novita, 2022).

Selain itu pada 2019 ASEAN sudah menyetujui salah satu ide yang diusulkan Indonesia guna menghadapi Indo-Pasifik. Konsep yang di inisiasi oleh Indonesia pada pertemuan KTT ASEAN di Bangkok, 22 Juni 2019 tersebut disepakati untuk diterapkan oleh ASEAN yang kemudian memiliki nama *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. Dengan disetujuinya *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)*.

Dengan adanya Instrumen-instrumen ini maka seharusnya ini menjadi pedoman atau acuan bagi ASEAN untuk berupaya menjaga keutuhan tubuh ASEAN agar tidak berpihak ke sudut manapun, kemudian menjaga perdamaian stabilitas kawasan dan tetap terus mendorong ASEAN untuk memainkan peran sentral. Quad merupakan aliansi ideologi antara Amerika Serikat (AS), Australia, Jepang, dan India. Sementara AUKUS disebut sebagai aliansi keamanan antara Australia, Inggris, dan AS. Dalam hal ini jelas Quad dan AUKUS sangat terlihat tidak memperhatikan keberadaan ASEAN. ASEAN yang merupakan tuan rumah di kawasan sudah memiliki instrument AOIP dan sudah dikomunikasi kepada setiap Negara. Dengan adanya instrument tersebut

seharusnya antara QUAD, AUKUS dan China menghargai upaya ASEAN untuk menjaga perdamaian dan stabilitas Kawasan (Nindya & Abiyya, 2022).

Berdasar kepada prinsip bebas-aktif yang dimiliki oleh Indonesia dan prinsip *ASEAN Centrality* yang perlu di jaga, Indonesia sebagai saudara tua di Asia Tenggara yang telah intens melahirkan gagasan yang digunakan oleh ASEAN sebagai konstruksi dalam menghadapi setiap persoalan bersama perlu sekali lagi bersikap aktif dan bersikap solutif dengan merangkul seluruh anggota ASEAN untuk duduk bersama mengadakan dialog menyamakan persepsi terhadap dinamika lingkungan yang terjadi di kawasan. Langkah tersebut perlu dilakukan oleh Indonesia akibat adanya perbedaan pandangan dalam menghadapi adanya pakta pertahanan baru maupun menyikapi pengaruh China yang kian agresif dalam sengketa Laut China Selatan yang berimplikasi terhadap pecahnya suara anggota negara ASEAN dalam menyikapi dinamika yang terjadi. kesamaan pandangan yang terjalin diantara negara ASEAN tidak hanya akan menjaga marwah ASEAN selaku tuan rumah dari *center of gravity* konflik yang terjadi, namun juga akan menghadirkan sentralitas, melindungi kepentingan nasional masing – masing negara, serta memberikan efek penggentar dari kekuatan negara – negara ASEAN dalam menghadapi berbagai pengaruh kekuatan yang hadir di kawasan (Novita, 2022).

## KESIMPULAN

Hadirnya kesepakatan pakta pertahanan AUKUS, strategi Quad dan FOIP yang mendahuluinya, menjadi bukti adanya persaingan pengaruh yang terjadi antara dua kekuatan berupaya untuk melibatkan semua aktor di kawasan. Hal tersebut telah memberikan ancaman kepada kepentingan nasional negara – negara di ASEAN. Lebih jauh, kehadiran pengaruh yang ada memberikan isyarat bahwa sentralitas yang dimiliki oleh ASEAN bukan lah persoalan yang rigid dan dapat dikatakan bukanlah merupakan prinsip yang kuat. Hal tersebut dapat dilihat bahwa ketidakmampuan ASEAN dalam menjaga prinsip sentralitasnya dengan memberikan kesamaan pandangan dan sebaliknya gagal membuat negara anggota saling memiliki perspektif yang berbeda dalam menghadapi dinamika yang terjadi.

Dalam menghadapi dinamika lingkungan yang terjadi dapat dicapai dengan munculnya Indonesia yang mengambil inisiasi dan berperan aktif dalam membangun kesamaan pandangan yang dimiliki oleh negara – negara anggota ASEAN sebagaimana sebelumnya telah intens dilakukan. Terlebih Indonesia sebagai bagian dari Asia Tenggara merupakan negara yang memiliki prinsip bebas-aktif yang berupaya untuk menjaga keseimbangan dari pengaruh dua kekuatan yang ada di dunia. Prinsip yang terjaga akan melindungi sentralitas ASEAN sekaligus melindungi kepentingan nasional masing – masing anggota di sisi lain akan menjadi kekuatan regional yang dibangun secara kolektif diperhitungkan oleh blok - blok kekuatan yang ada.

## REFERENSI

- Afrimadona, & Komeini, Y. (2013). Perspektif-perspektif Utama dalam Kajian Strategis. In A. A. B. Perwita (Ed.), *Pengantar Kajian Strategis*. Graha Ilmu.
- Aisyah, N. (2022, July 22). *Indonesia akan Jadi Ketua ASEAN Tahun 2023, Ini Tugas-tugasnya*. DetikEdu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6192782/indonesia->

- akan-jadi-ketua-asean-tahun-2023-ini-tugas-tugasnya
- Anh, T. (2021, September 21). *Vietnam Spells Out Stance on AUKUS*. Hanoi Times. <https://hanoitimes.vn/vietnam-spells-out-stance-on-aucus-318802.html>
- Arifan, S. (2018). *Peran Indonesia di ASEAN Dalam Mempersiapkan ASEAN Community*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11791>
- Chatys, M. (2021, October 1). *Vietnam and Japan Partners Amid Superpower Rivalry*. Fulcrum. <https://fulcrum.sg/vietnam-and-japan-partners-amid-suVietnperpower-rivalry/>
- Choong, W. (2020). *China-US Relations: Singapore's Elusive Sweet Spot* (No. 80). ISEAS Perspective. [https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2020/07/ISEAS\\_Perspective\\_2020\\_80.pdf](https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2020/07/ISEAS_Perspective_2020_80.pdf)
- Delanova, M. O. (2021). Dampak Pakta Pertahanan Trilateral Aukus Terhadap Kondisi Regional Indo-Pasifik. *Jurnal Dinamika Global*, 6(2), 259–285. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v6i2.408>
- Edel, C. (2021, September 24). *China Has Only Itself to Blame for AUKUS*. Foreign Policy. <https://foreignpolicy.com/2021/09/24/china-AUKUS-submarines-defense/>
- Febriansyah, A., & Herviani, V. (2016). Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi*, 8(2), 19–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.34010/jra.v8i2.525>
- Gaol, T. L. (2017). Peran Asean Maritime Forum (AMF) dalam Menjaga Keamanan Maritim (Studi Kasus Perompakan di Perairan Selat Malaka). *JOM FISIP Universitas Riau*, 4(1), 1–9. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/13300>
- Grabowski, W. (2020). Application Of The Regional Security Complex Theory For Security Analysis In The Persian Gulf. *Athenaum: Polish Political Science Studies*, 68(4), 18–31. <https://doi.org/10.15804/athena.2020.68.02>
- Grehenson, G. (2021, May 1). *Indonesia Kembali Menjadi Ketua ASEAN Tahun 2023*. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/21086-indonesia-kembali-menjadi-ketua-asean-tahun-2023>
- Kemlu RI. (2021, September 17). *Pernyataan mengenai Kapal Selam Nuklir Australia*. [https://kemlu.go.id/portal/id/read/2937/siaran\\_pers/pernyataan-mengenai-kapal-selam-nuklir-australia](https://kemlu.go.id/portal/id/read/2937/siaran_pers/pernyataan-mengenai-kapal-selam-nuklir-australia)
- Ministry of Foreign Affairs of Kingdom of Thailand. (2021, September 25). *Prime Minister Delivered Statement at the General Debate of the 76th Session of the United Nations General Assembly (UNGA76)*. <https://www.mfa.go.th/en/content/pmunga76-2>
- Ministry of Foreign Affairs of Singapore. (2021, September 16). *Prime Minister Lee Hsien Loong's Telephone Call with Australian Prime Minister Scott Morrison, 16 September 2021*. <https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2021/09/20210916-PM-Call-With-Scott-Morrison>
- Nepomuceno, P. (2021, September 17). *Australia has right to improve sub defense capability*. Philippine News Agency. <https://www.pna.gov.ph/articles/1153864>
- Nindya, A. P., & Abiyya, R. A. (2022). Pengaruh AUKUS terhadap Stabilitas Indo-Pasifik dan Sikap Indonesia. *Jurnal Politika*, 13(1), 67–84. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jp.v13i1.2917>
- Novita, A. A. D. (2022). AUKUS Alliance: United States Strategic Interest in Indo-Pacific. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 8(1), 1–14. <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/article/view/883/787>

- Pisanò, A. (2014). Human Rights and Sovereignty in the ASEAN Path Towards a Human Rights Declaration. *Human Rights Review*, 15(4), 391–411. <https://doi.org/10.1007/s12142-014-0313-7>
- Prasojo. (2013). Senjata dan Keamanan Nasional. In A. A. B. Perwita (Ed.), *Pengantar Kajian Strategis*. Graha Ilmu.
- Razak, R. (2019, October 21). *Warships in South China Sea will invite conflict, says Dr M*. Malay Mail. <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/10/21/warships-in-south-china-sea-will-inviteconflict-says-dr-m/1802234>
- Rosyidin, M. (2021, September 19). *AUKUS Dan Prospek Keamanan Indo-Pasifik*. RMOL.ID. <https://publika.rmol.id/read/2021/09/19/504912/aucus-dan-prospek-keamanan-indo-pasifik>
- Sari, S. (2019). Peran Indonesia Dalam Implementasi ASEAN Political Security Community. *Jurnal Dinamika Global*, 4(1), 24–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v4i01.100>
- Shirodkar, R. (2021, September 18). *Malaysia Says AUKUS Alliance May Lead to Arms Race, Provocation*. Bloomberg. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-18/malaysia-saysAUKUS-alliance-may-lead-to-arms-race-provocation>
- Travis, D. (2016). *Desk Research*. User Focus.
- Welianto, A. (2020, March 5). *Politik Luar Negeri Indonesia*. Kompas. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/05/200000469/politik-luar-negeri-indonesia?page=all>
- Wibowo, A. S. (2010). Kepemimpinan Indonesia Dalam ASEAN : Dari Soeharto Sampai Susilo Bambang Yudhoyono. *Jurnal Universitas Paramadina*, 7(2), 101–116. <https://adoc.pub/kepemimpinan-indonesia-dalam-asean-dari-soeharto-sampai-susi.html>
- Windiani, R. (2013). Politik Luar Negeri Indonesia dan Globalisasi. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 1(2), 88–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/politika.1.2.2010.88-98>
- Wintour, P. (2021, September 16). *What is the Aukus alliance and what are its implications?* The Guardian. <https://www.theguardian.com/politics/2021/sep/16/what-is-the-aukus-alliance-and-what-are-its-implications>